

**SKRIPSI**

**ANALISIS FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTRATOR  
PEMBANGUNAN DI DESA PULAU RENGAS KECAMATAN PANGEAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



**DISUSUN OLEH**

**ANDRI SISPIKA**  
**NIM. 10875004150**

**PROGRAM S1**  
**ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**1433 H/2012 M**

**SKRIPSI**

**ANALISIS FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTRATOR  
PEMBANGUNAN DI DESA PULAU RENGAS KECAMATAN PANGEAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Serjana SI Administrasi  
Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**DISUSUN OLEH**

**ANDRI SISPIKA**  
**NIM. 10875004150**

**PROGRAM S1**  
**ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**1433 H/2012 M**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN DI DESA PULAU RENGAS KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. OLEH : ANDRI SISPIKA**

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan pengamatan awal terhadap Desa ini ada indikasi bahwa kepala Desa kurang dapat melaksanakan Fungsinya sebagai Administrator Pembangunan Dasa. Hal ini dapat di ketahui masih adanya pelaksanaan pembangunan yang tidak tercapai target atau tidak sesuai dengan realisasinya. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana Fungsi Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di Desa pulau rengas kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi. untuk mendukung penelitian ini peneliti menggunakan Peraturan Daerah kabupaten kuantan singingi No 2 tahun 2009 pasal 11 menjelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu menggerakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa, menggerakan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa, memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat, dan menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dengan menyebarkan quiaioner terhadap 63 kk di desa pulau rengas kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa pulau rengas kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi di anggap cukup baik.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1   Latar Belakang.....	1
1.2   Perumusan Masalah.....	7
1.3   Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
 <b>BAB II   TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1   Otonomi Daerah.....	9
2.2   Pengertian Desa dan Kepala Desa .....	13
2.2.1 Pengertian Desa.....	13
2.2.2 Pengertian Kepala Desa .....	16
2.3   Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan .....	20
2.4   Pengertian Administrasi Pembangunan .....	24
2.5   Konsep Operasional .....	27
2.6   Kerangka Pemikiran.....	28
 <b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
3.1   Lokasi Penelitian.....	29
3.2   Populasi dan Sampel .....	29

3.3	Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5	Teknik Analisis Data .....	32

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1	Tinjauan Sejarah .....	34
4.2	Keadaan Geografis.....	35
4.3	Keadaan Penduduk .....	37
4.4	Mata Pencaharian.....	39
4.5	Kehidupan Sosial Keagamaan .....	40
4.6	Pendidikan .....	42
4.7	Struktur Pemerintahan .....	43

#### **BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

5.1	Identitas Responden.....	46
5.1.1	Tingkat Pendidikan.....	46
5.1.2	Golongan Umur .....	47
5.1.3	Jenis Kelamin .....	48
5.2	Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa .....	49
5.2.1	Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan.....	49

#### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1	Kesimpulan .....	88
6.2	Saran.....	89

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Table. I. 1</b>	: Rencana target dan realisasi program pembangunan Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2011 .....	5
<b>Tabel. I.2</b>	: Rincian Anggaran dana pertahun Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	6
<b>Tabel 3.1</b>	: Jumlah Populasi dan Sampel dalam penelitian .....	30
<b>Tabel IV.I</b>	: Luas Wilayah Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi .....	36
<b>Tabel IV.2.</b>	: Jumlah Penduduk Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	37
<b>Tabel IV.3</b>	: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi .....	38
<b>Tabel IV.4</b>	: Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi .....	38
<b>Tabel IV.5</b>	: Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean .....	40
<b>Tabel IV.6</b>	: Jumlah Penduduk Desa Pulau Rengas berdasarkan agama dan Kepercayaan yang di anutnya .....	41
<b>Tabel IV.7</b>	: Jumlah Tempat ibadah di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	41
<b>Tabel IV.8</b>	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi .....	44

<b>Tabel V.1</b>	: Tingkat Pendidikan responden masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi .....	46
<b>Tabel .V.2</b>	: Golongan Umur Responden Masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi .....	47
<b>Tabel.V.3</b>	: Jenis kelamin Responden Masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi .....	48
<b>Tabel V.4</b>	: Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa Di pulau Rengas .....	50
<b>Tabel V.5</b>	: Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa .....	52
<b>Tabel V.6</b>	: Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam Menanggapi perangkat Desa yang tidak Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Desa .....	53
<b>Tabel V.7</b>	: Tanggapan Responden terhadap fungsi Kepala Desa Melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan pemerintah Desa Pulau Rengas.....	54
<b>Tabel V.8</b>	: Rekapitulasi tanggapan responden mengenai fungsi Kepala Kepala Desa menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa .....	56
<b>Tabel V.9</b>	: Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.....	59
<b>Tabel V.10</b>	: Tanggapan responden terhadap upaya yang di lakukan kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang di lakukan oleh kepal Desa .....	61

<b>Tabel V.11</b>	: Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam melakukan pembinaan terhadap perangkat Desa dan masyarakat dalam pembangunan desa pulau rengas ..	62
<b>Tabel V.12</b>	: Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Menanggapi pelaksanaan pembangunan yang tidak Terealisasi dengan baik di Desa pulau rengas .....	63
<b>Tabel V.13</b>	: Rekapitulasi tanggapan responden mengenai Fungsi Kepala Desa dalam Menggerakan pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Desa .....	65
<b>Tabel V.14</b>	: Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam Mempasilitasi upaya peningkatan Partisipasi Dan Swadaya Masyarakat .....	69
<b>Tabel V.15</b>	: Tanggapan Responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam Tanggapan masyarakat untuk Meningkatkan partisipasi dan Swadaya masyarakat.....	70
<b>Tabel V.16</b>	: Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam menghimpun partisipasi dan swadaya Masyarakat sebagai modal dana dalam pelaksanaan Pembngunan di Desa Pulau Rengas.....	71
<b>Tabel V.17</b>	: Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam menumbuh kembangkan partisipasi dan Swadaya Masyarakat .....	73
<b>Tabel V.18</b>	: Rekapitulasi tanggapan responden mengenai Fungsi Kepala Desa dalam memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan Swadaya masyarakat.....	74
<b>Tabel V.19</b>	: Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam menciptakan suasana ketentraman dan Ketertiban	78
<b>Tabel V.20</b>	: Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam membuat sistem keamanan Desa Pulau Rengas....	79



<b>Tabel V.21</b> : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam menanggapi perangkat desa yang tidak ikut Serta dalam Menciptakan ketentraman .....	80
<b>Tabel V. 22</b> : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam program siskamling yang di jalankan oleh Masyarakat .....	81
<b>Tabel V. 23</b> : Rekapitulasi tanggapan responden mengenai Fungsi Kepala Desa dalam menciptakan suasana Ketentraman dan Ketertiban .....	82
<b>Tabel V.24</b> : Rekapitulasi Hasil Angket tentang pelaksanaan fungsi Kepala Desa sebagai Administrator pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi .....	86

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat.

Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai munculnya ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI, hal tersebut ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber daya alam daerah di Indonesia yang tidak merata juga merupakan salah satu penyebab diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang memudahkan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi pendapatan nasional. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa daerah yang pembangunannya memang harus lebih cepat daripada daerah lain. Karena itulah pemerintah

pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yang disebut otonomi daerah.

Sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan-perubahannya memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dalam pelaksanaan pemerintahan perlu memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Pemerintah Desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat Desa sebagai badan kekuatan terendah, pemerintah desa memiliki kewenangan asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri (wewenang otonomi atau pemerintah desa) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan serta dari pemerintahan di atas. mengingat desa merupakan tempat segala urusan dari segenap unsur pemerintahan yang ada diatas. maka seorang kepala desa berkewajiban menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pembangunan desanya di samping harus menghadapi arus dan tuntutan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan potensi yang sangat besar untuk menunjang pembangunan desa merupakan dasar tercapainya dasar pembangunan nasional. Pembangunan desa harus di lakukan secara terarah dinamis dan

berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan desa akan terus di laksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang di miliki oleh desa yang bersangkutan, terutama yang menyangkut potensi manusia dan daya dukung alamnya.

Oleh karena itu, Kepala Desa merupakan administrator pembangunan, administrator pemerintaah dan administrator kemasyarakatan Desa. Mengadakan koordinasi dan kontrol atas segala kegiatan pembangunan di desa, terutama yang dilaksanakan oleh, untuk dan dari desa, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga desa. Derasnya laju pembangunan di desa adalah mencerminkan dari kegiatan, kreatifitas dan daya inisiatif Pemerintah Desa, tepatnya Kepala Desa untuk terlaksananya pembangunan tersebut.

Pembangunan desa diusahakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat Desa yang meliputi peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa dan pengembangan Lembaga Keuangan Desa serta ketertiban dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat desa menaikkan hasil produksinya. Dengan meluaskan produksi akan bertambah luas lapangan kerja dan bertambahnya lapangan kerja akan menaikkan pendapatan masyarakat. Ini merupakan pekerjaan rumah Kepala Desa yang tidak mudah.

Untuk melaksanakan hal tersebut sudah tentu sangat di perlukan seorang pemimpin, yaitu kepala desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam wilayah desanya karena kepala desanya itu sendiri adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, dengan demikian jelaslah bahwa kepemimpinan kepala Desa merupakan Administrator dalam pembangunan desa meskipun demikian, untuk menyelenggarakan fungsi administrasi desa secara baik dalam proses pembangunan, bukan merupakan suatu hal yang mudah. Tidak jarang kepala desa di hadapkan dengan kegagalan dalam menjalankan fungsinya tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengambil desa pulau rengas kecamatan pangean sebagai sampel dengan alasan desa ini di lihat dari pembangunan fisiknya tertinggal di bandingkan desa-desa yang berada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan pengamatan awal terhadap desa ini ada indikasi kepala desa kurang dapat melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan dasa. Hal ini dapat di ketahui masih adanya pelaksanaan pembangunan yang tidak tercapai target atau tidak sesuai dengan realisasinya. Dari Hasil penelitian tersebut sebagaimana tergambar dalam table berikut ini :

**TABLE. I. 1 : Rencana target dan realisasi program pembangunan Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2011.**

No	Dusun	Target pembangunan	Realisasi pembangunan	Persentase
1.	Rengas Ujung	- Pembangunan 1 unit posyandu - Rehab mesjid	Pembangunan posyandu -	100 % -
3	Rengas Tengah	- Balai desa - Semenisasi jalan	Balai desa -	50 % -
4	Seluruh Dusun	- Listrik Desa - Pelebaran jalan desa	- Listrik desa - Pelebaran jalan	45 % 45 %

*Sumber : Kantor Kepala Desa Tahun 2011*

Dari tabel di atas dapat kita lihat dari sekian banyak program pembangunan yang di rencanakan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi hanya beberapa program yang terealisasi dengan baik. Diantaranya pembangunan 1 unit posyandu 100% yang terealisasi dengan baik, sedangkan rehab mesjid realisasinya belum ada, begitu juga dengan perencanaan yang ada untuk dusun tengah yaitu pembuatan balai desa yang hanya terealisasi 50% dan semenisasi untuk dusun tersebut belum terlaksana. Serta listrik dan pelebaran jalan desa yang masing masing hanya terealisasi 45%. Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan pembangunan ini seharusnya mampu melibatkan dan membawa aparatur

Desa, masyarakat Desa menyelenggarakan pembangunan tersebut. Fungsi Kepala Desa dalam perencanaan ini sangat dibutuhkan karena Kepala Desa adalah salah satu pemimpin yang berada dalam desanya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan pembangunan yang ada di Desanya.

Perencanaan yang dibuat oleh kepala Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini diduga karena ketidak cakapan kepala Desa dalam mengambil keputusan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga hasil dari pembangunan tersebut tidak sesuai seperti apa yang di harapkan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat Anggaran dana desa pulau rengas pada tabel di bawah ini :

**Tabel. I.2 : Rincian Anggaran dana pertahun Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	SUMBER DANA/TAHUN	Jumlah
1	Anggaran dana desa	80.000.000
2	Pendapatan asli desa	15.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>95.000.000</b>

*Sumber : kantor kepala desa pulau rengas.2011*

Dari tabel di atas dapat kita lihat sumber pendapatan Desa Pulau rengas di antaranya adalah anggaran dana Desa sebanyak RP 80.000.000. dan pendapatan asli Desanya sebanyak RP15.000.000 dengan total anggaran dana sebanyak 95.000.000 pertahunnya. anggaran dana ini di gunakan untuk pembangunan Desa. Dengan anggaran dana dan perencanaan pembangunan yang ada di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan

Singingi seharusnya pembangunan yang ada di Desa tersebut sudah terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN DI DESA PULAU RENGAS KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.”**

## **1.2 Perumusan Maslah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas penulis merumuskan permasalahan pada penelitian sebagi berikut: **“Bagaimana Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan Di Desa Pualu Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui pelaksaan fungsi kepala desa sebagi administrator pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi kepala desa sebagai administrartor pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.



### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

- 1) Sebagai aplikasi dari teori perkuliahan yang berkaitan dengan masalah pengembangan ilmu administrasi Negara, khususnya kepemimpinan dan kebijakan pemerintah desa.
- 2) Sebagai penambah referensi bagi penulis lain tentang permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Otonomi Daerah**

Menurut HAW.Widjaja (2002 : 76) Otonomi daerah adalah Kewenangan daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat,sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dan Otonomi Daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terus perlu dilakukan perkembangan wilayah pemerintahan dan pembangunan. Ini berarti diperlukan dinamisasi terus-menerus dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dibutuhkan, pengembangan selanjutnya dapat didasarkan kepada panca konsep manajemen pemerintahan publik, yaitu:

1. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
2. Sinergi antara berbagai sub sistem-sub sisten manajemen pemerintahan publik.
3. Azas *cost-benefit* yang berimbang.
4. Abdi Negara yang ditranspormasikan menjadi abdi masyarakat.
5. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab panca konsep manajemen publik tersebut

berorientasi pada kepentingan masyarakat dan ada keterpaduan antara kebijaksanaan otonomi daerah (Ermaya Suradinata, 2006 : 45-45).

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintah pusat. Dalam undang undang tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah yaitu :

Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota
- 4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

### 2.1.1 Otonomi Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang juga mengatur mengenai desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada dalam kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa Undang-Undang ini memberikan dasar menuju *self governing community* yaitu komunitas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan social budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi sangat strategis hingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah karena Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang ini di jelaskan bahwa pemerintah desa adalah :

1. Keanekaragaman, memiliki makna bahwa istilah desa dapat di sesuaikan dengan asal usul kondisi sosial budaya masyarakat seperti Nagari, Negeri, Pekon, Lembang, Pamusangan, huta, Bori atau Marga.
2. Partisipasi memiliki makna bahwa penyelengaran Pemerintah Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa

3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan masyarakat setempat di dasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern.
4. Demokrasi, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui badan perwakilan desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa di abadikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Otonomi daerah dalam hubungannya dengan desa, juga diatur dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005, disebutkan bahwa urusan yang berdasarkan hak asal-usul, urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan ke desa, dan setiap kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa diatur dengan perda. Urusan apa saja yang bisa diserahkan adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap urusan yang diserahkan kepada desa harus disertai dengan pembiayaan. Tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi atau dari kabupaten/kota, maksudnya adalah tugas yang seharusnya tugas pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten tetapi diperbantukan ke desa harus disertai dengan dukungan

pembiayaan, sarana dan prasarana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2.2 Pengertian Desa dan Kepala Desa**

### **2.2.1 Pengertian Desa**

Menurut Yuliati, (2003:24), menyatakan bahwa desa sendiri berasal dari bahasa india yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan Norma serta memiliki batas yang jelas.

Melihat dari defenisi itu maka kita dapat menemui banyak istilah di Negara kita tentang masyarakat tersebut seperti dusun bagi masyarakat Sumatra Selatan, Dati bagi Maluku, Nagari bagi Minang kabau atau Wanua di minahasa. Pada daerah lainnya masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Wilayah pedesaan merupakan sebuah interaksi dinamis antara sistem yang secara struktural terdiri dari lima komponen atau Subsistem yang menyusun desa. Perilaku interaktif dari setiap sub sistem ini dapat memberikan output tertentu sebagai tujuan dan sasaran pembinaan pedesaan. Dengan mengetahui komponen dasar ini maka sosiologi pedesaan akan lebih dapat di arahkan untuk mendukung output akhir dari pembinaan terhadap masyarakat desa yakni

meningkatkan kesejahteraan masyarakat beserta keluarganya dan menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati desa.

Menurut Kansil (2001:21) desa adalah suatu daerah yang di tempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang di tempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang berhak menyelenggarakan pemerintahan atau rumah tangganya sendiri.

Kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan manfaat dan memberdayakan potensi desa. Dalam meningkatkan pendapatan desa pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri. HAW Widjaja (2003 : 84), Desa memiliki ciri yang khas sebagaimana yang di cirikan sebagi berikut:

1. Secara Umum :

- a. Dengan bahasa ibu yang kental
- b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah
- c. Mata pencaharian yang umumnya di sector pertanian

2. Secara ekonomi :

- a. Dengan komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas.

3. Secara sosiologis :

- a. Dengan dua makna positif dan negative
- b. Makna positif yang melekat di desa antara lain kebersamaan dan kejujuran.
- c. Makna negative seperti kebodohan dan keterbelakangan.

4. Secara Hukum dan politik :

- a. Dengan adanya otonomi yang membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk, yang sebenarnya hanya di ketahui dan di sediakan sendiri oleh masyarakat desa, bukan pihak luar.

Kemudian penjelasan desa dalam pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Desa mempunyai organisasi pemerintahan yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional, mempunyai kewenangan mencakup:
  - a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa
  - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
  - c. Tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi atau Pemerintah kabupaten.
- 2) Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintahan kabupaten kepada desa di sertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.



- 3) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak di sertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

### **2.2.2 Pengertian Kepala Desa**

Desa di pimpin oleh seorang kepala desa yang di pilih penduduk setempat sedangkan kelurahan di kepalai oleh seorang lurah yang di angkat oleh pejabat yang berwenang dari pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kepala Desa di pilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara republik Indonesia, di lantik oleh Bupati atau walikota paling lambat tiga puluh hari setelah pemilihan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 203 tentang Pemerintahan Daerah Tugas dan Kewajiban kepala desa adalah :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 3) Perekonomian desa
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa

- 6) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kusa hukumnya
- 7) Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkan sebagai peraturan desa.
- 8) Menjaga kelestarian adat istiadat yang cukup hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan
- 9) Pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkan kepada pemerintah melalui Bupati dengan tembusan kepada camat.

Kepala desa sebagai pemimpin terdepan atau aparat pemerintah yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat, mengemban tugas dan tanggung jawab berat dan membutuhkan ketekunan yang tinggi, di samping diuntut menjalankan fungsi yang aktif untuk mengupayakan dan menciptakan strategi dan metode dalam menghadapi tuntutan tugas.

Pemimpin menurut Henry Pratt Fairchild (dalam HAW Widajaja: 2003: 12) adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan dan mengorganisasir atau mengontrol usaha orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan, atau posisi.

Menurut Ginanjar (1996 : 41), seorang pemimpin harus mempunyai tiga sifat yaitu :

- 1) Ia harus memiliki idialisme, artinya jelas kemana dan arah mana ia membawa yang di pimpinnya.
- 2) Ia harus memiliki pengetahuan untuk mendapat secara efektif membawa yang di pimpinya ke arah tujuan yang di idealkanya, ia
- 3) Seorang pemimpin harus menjadi teladan dan sumber aspirasi,

Selain sifat-sifat yang harus di miliki seorang pemimpin ia juga harus bisa mengendalikan dirinya sendiri karena bila kemampuan tersebut tidak di miliki maka sulit untuk berhasil.

Dengan mengacu kepada pendapat diatas jelaslah bahwa tugas seorang pemimpin sangatlah berat karena ia harus dapat mengarahkan orang lain dan memainkan perannya agar ia benar-benar mendapat tempat di tengah-tengah pengikutnya, karena itu pemimpin yang menjalankan tuga-tugas kepemimpinanya harus dapat mensesuaikan ketiga unsur di atas. Yang di maksudkan oleh penulis di sini adalah kepala desa yang memimpin desa tersebut.

Dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten

secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat istiadat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh dan pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat. Adapun wewenang BPD yaitu membahas rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertib BPD.

### **2.3 Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator pembangunan**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 11 Menjelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa.
2. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.
4. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepala Desa sebagai pemimpin terdepan atau aparat pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat mengemban tugas dan bertanggung jawab yang berat. Ia harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik karena Kepala Desa adalah pemimpin dari masyarakat Desanya. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bombing atau tuntun, kata kerjanya

adalah memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata bendanya adalah pemimpin yaitu orang yang memimpin atau menuntun.

Menurut Susilo Maryoto, (1997:158) kepemimpinan adalah keseluruhan aktifitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Berdasarkan beberapa batasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dasarnya kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan atau kegiatan seorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan dengan kata lain kepemimpinan adalah perpaduan dari faktor pemimpin, pengikut dan situasi.

Selain teori diatas, Islam juga menawarkan konsep mengenai kepemimpinan tersebut. Untuk memahami dasar konseptual dalam Islam paling tidak harus digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif, historis dan teoritis (*Veithzal Rivai, 2004* )

#### 1. Pendekatan Normatif

Dasar konseptual kepemimpinan Islam secara normatif bersumber pada Al qur'an dan hadis yang terbagi atas empat pokok yaitu :

##### a. Prinsip tanggung jawab dalam organisasi .

Dalam Islam telah di gariskan bahwa setiap diri adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri) dan untuk kepemimpinan itu ia di tuntutan untuk bertanggung jawab. Untuk memahami makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus di pahami terlebih dahulu oleh

seorang calon pemimpin agar amanah yang di serahkan kepadanya tidak di sia-siakan.

b. Fungsi etika tauhid

Kepemimpinan Islam dikemabangkan diatas prinsip-prinsip etika tauhid. Persyaratan utama seorang pemimpin yang telah digariskan oleh Allah SWT pada firmanya dalam surat Ali Imran (3) ayat 118, yang artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang diluar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang memisahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang di sembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan padamu ayat-ayat (kami) jika kamu memahaminya.*

c. Prinsip Keadilan

Untuk menjaga keseimbangan kepentingan, maka azas keadilan harus benar-benar diu jaga agar tidak muncul stigma-stigma ketidakadilan seperti kelompok marjinal dan lain-lain. Firman Allah SWT dalam surat shad (38) ayat 28 yang artinya:

*Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (pengusa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti bahwa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena ia melupakan hari perhitungan.*

#### d. Prinsip Kesederhanaan

Rusulullah SAW menegaskan bahwa pemimpin itu harus melayani dan tidak meminta untuk di layani sebagai mana sabdanya, yang artinya : *pemimpin sutau kaum adalah pelayanan mereka (H.R.Abu Na'im).*

### 2. Pendekatan Historis

Al Qur'an begitu kaya akan kisah-kisah umat masa lalu sebagai perjalanan dan bahan perenungan bagi umat yang akan datang. Dengan pendekatan historis ini di harapkan akan lahir pemimpin-pemimpin Islam yang memiliki sifat sidik, amanah, fathonah dan lain-lain sebagi syarat keberhasilannya dalam memimpin.

### 3. Pendekatan Teoritis

Ideologi Islam adalah ideologi yang terbuka. Hal ini mengandung arti walaupun dasar-dasar konseptual yang ada di dalam bangunan ideologi Islam sendiri sudah sempurn, namun Islam tidak menurut kesempatan mengkomunikasikan ide-ide dan pemikiran-pemikiran dari luar Islam selama pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Pengembangan ilmu pengetahuan, kerangka manajemen Islam selama dalam koridor ilmiah tentunya sangat di anjurkan mengingat kompleksitas permazalahan dari zaman ke zaman akan selalu bertambah dan sejarah Islampun mencatat dalam setiap zaman akan lahir pembaharu-pembaharu pemikiran Islam yang membangun dasar-dasar konseptual yang relevan dengan zamannya.



## 2.4 Pengertian Administrasi Pembangunan

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut, maka ada beberapa pengertian tentang administrasi pembangunan. Yaitu menurut Atmosudirjo (1999: 59) Administrator merupakan pemimpin suatu administrasi atau unit organisasi bertanggung jawab kepada pemilik (megister) yang membberikan tugas, kewajiban, dan pengarahan kepadanya.

Menurut Herbert A. Simon (2003: 5). Administrasi dapat di rumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kerja sama untuk mencapai kegiatan sedangkan hadarnawawi mengatakan bahwa Administrasi adalah serangkain kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah di rumuskan sebelumnya

Menurut The Liang Gie (Dalam buku inu kencana syafi'i) Administrasi adalah Segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang di lakukan oleh setiap kelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Kartini Kartono, 2006), Admistrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih di dasarkan atas rasionalitas tetentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Dalam buku petunjuk Administrasi terbitan Universitas Gajah Mada, Administrasi di sebutkan sebagi berikut:

1. Suatu aktifitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula.

2. Suatu proses yang lazim terdapat dalam segala usaha bersama baik swasta maupun pemerintah, baik usaha yang berskala kecil maupun besar.
3. Suatu pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus.
4. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari pengertian Administrasi di atas, maka yang dimaksudkan oleh penulis dengan “Administrator” disini adalah seorang dengan kemampuannya maupun pengetahuannya dan dengan caranya sendiri mampu menyelenggarakan pekerjaannya yang telah di rencanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut S.P. Siagian, (2006:91) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkainya usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan di laksanakan secara sadar oleh suatu bangsa Negara dan pemerintahan dalam rangka pembinaan bangsa.

Mencermati definisi Administrasi pembangunan di atas dan sejalan dengan harapan penulis maka yang di maksudkan dengan “Administrator pembangunan” di desa harus mampu mengimplementasikan fungsinya dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan, mampu menyelenggarakan berbagai pemerintahan secara efisien dan efektif.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang di pilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Eulau dan Prewitt kebijakan adalah suatu ketetapan yang berlaku yang mencirikan perilaku yang konsisten

dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Sedangkan menurut Titmuss kebijakan adalah suatu prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang di arahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, dan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*).

Menurut Edi Suharto (2005 : 7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang di buat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan menurut (*freeman dan Sherwood*) di kelompokkan dalam tiga tahap, pertama adalah tahap identifikasi, kedua tahap implementasi, kemudian yang ketiga adalah tahap evaluasi. Berikut langkah-langkah dari masing-masing tahap meliputi :

#### 1. Tahap Identifikasi

- 1) Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat
- 2) Analisis masalah kebutuhan masyarakat
- 3) Penginformasian rencana dan kebijakan kepada masyarakat
- 4) Perumusan tujuan kebijakan yang akan di tetapkan
- 5) Pemilihan model kebijakn yang paling tepat
- 6) Penentuan indikator
- 7) Membangun dukungan dan legitimasi public atau masyarakat.

#### 2. Tahap Implementasi

- 1) Perumusan kebijakan yang akan di ambil
- 2) Perencanaan dan implementasi program yang telah di tetapkan

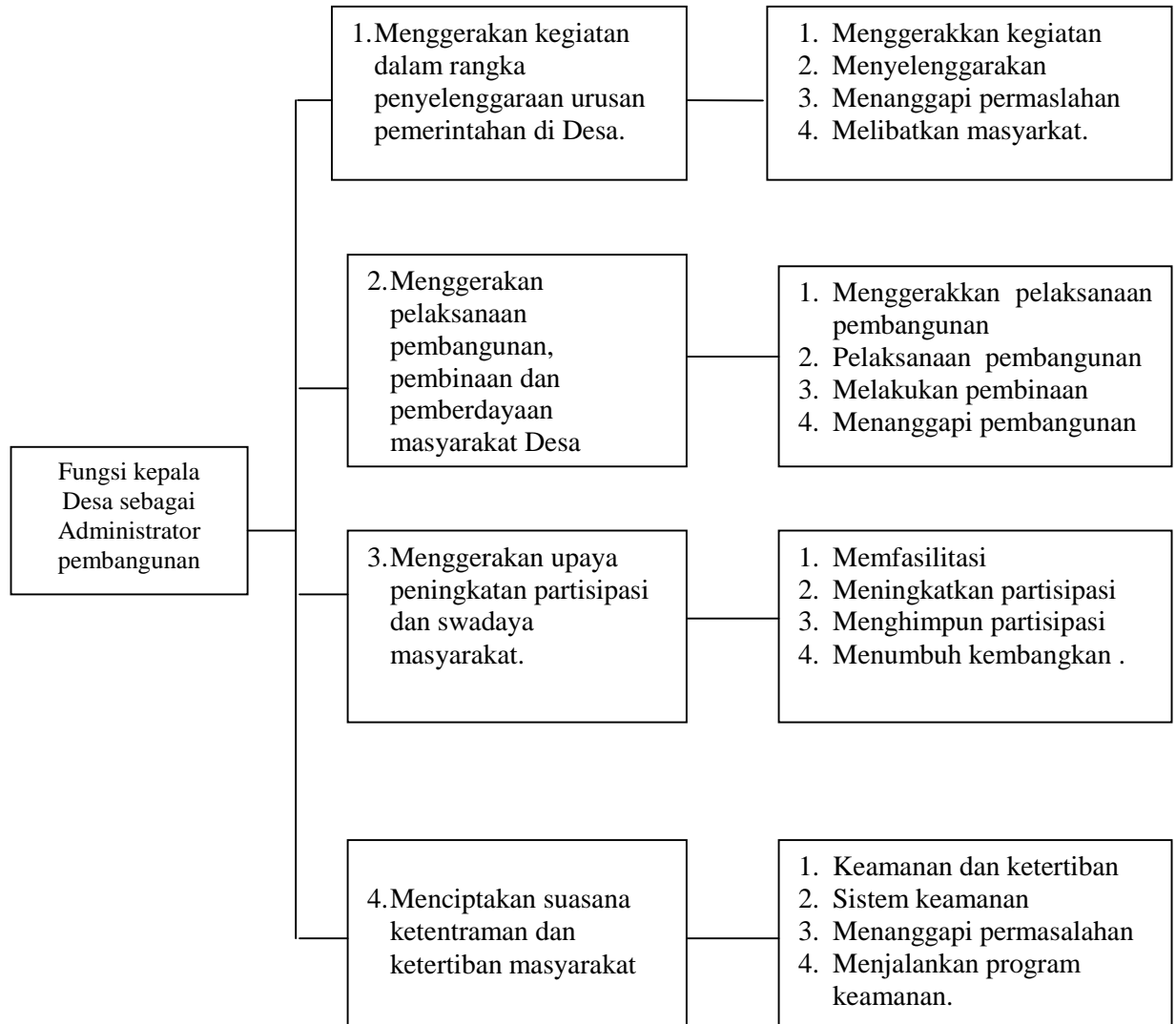
### 3. Tahap Evaluasi

#### 1) Evaluasi hasil dan tindak lanjut

## 2.5 Konsep Operasional

Definisi konsep	Variable penelitian	indikator	Skala pengukuran
Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembnagunan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Tata Kerja Pemerintahan Desa pasal 11.	Fungsi kepala Desa sebagai administrator pembangunan	1. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa	a.Sangat baik b.Baik c.Cukup baik d.Tidak baik e.Sangat tidak baik
		2. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan , pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa	a.Sangat baik b.Baik c.Cukup baik d.Tidak baik e.Sangat tidak baik
		3. Mempasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat	a.Sangat baik b.Baik c.Cukup baik d.Tidak baik e.Sangat tidak baik
		4. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.	a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Tidak baik b. Sangat tidak baik

## 2.6 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan alasan desa ini relative tertinggal dari segi pembangunan fisik dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012. Di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Menurut (*Sugiono, 2005 : 90*) Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa dan Masyarakat di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 893 jiwa dari 170 KK (Data tahun 2011). Dalam mengambil sampel dari masyarakat peneliti menggunakan rumus slovin, (*Husen Umar, 2004 : 72*).

**Tabel 3.1: Jumlah Populasi dan Sampel dalam penelitian**

No.	Jabatan	Populasi	Persentase
1	Kepala Desa	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	100%
3	Ketua BPD	1	100%
4	Tokoh masyarakat	3	100%
5	KK	170	37,58%
<b>Jumlah</b>		176	

*Sumber Data: Data Olahan Lapangan. 2011*

Dalam mengambil sampel dari masyarakat peneliti menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

$e^2$  : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan, dimana tingkat kesalahan yang ingin diambil 10 % dengan jumlah masyarakat sebesar 170 kk.

$$n = \frac{170}{1 + 170(10\%)^2}$$

$$n = \frac{170}{1 + 170(0,01)}$$

$$n = \frac{170}{2,7}$$

$$n = 62,96 = 63$$

Jadi jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 63 dari 170 populasi.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung dari responden.

Data yang di butuhkan adalah data tentang pelaksanaan pembangunan pada desa pulau rengas kecamatan pangean kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari pihak kedua yang sifatnya mendukung dalam penelitian. data ini di peroleh dari kantor camat pangean dan kantor kepala desa pulau rengas kecamatan pangean.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan melalui beberapa cara/metode, yaitu :

1. Observasi

Yaitu pantauan yang dilaksanakan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data sesuai dengan masalah yang di teliti.

2. Wawancara (Interview)

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang di lakukan melalui dialog dan tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait yang di anggap perlu atau yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya. wawancara ini di lakukan dengan aparatur Desa yaitu kepala Desa, sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Tokoh masyarakat yang ada di Desa pulau rengas kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.

3. Angket (Quesioner)

Yaitu kegiatan penyebaran angket yang berupa daftar tertulis kepada responden, yang di sesuaikan dengan alternative jawaban yang



telah disediakan. Quisioner ini di berikan kepada masyarakat desa yang mempunyai KK yang ada di desa pulau rengas kecamatan pangean kabupaten kuantan singing.

### 3.5 Teknik Analisa Data

Setelah data dan semua bahan yang di butuhkan terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan di sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini Data dianalisa secara Deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variable yang diteliti, kemudian di uraikan, dijelaskan berdasarkan data hasil penelitian.

Berdasarkan metode penelitian yang telah di kemukakan di atas maka data informasi yang diperoleh akan di kelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan di beri nilai persentase, di sajikan dalam bentuk tabel dan urain dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = frekuensi

N = Jumlah Responden

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan fungsi kepala Desa sebagai Administrator pembangunan di Desa pulau Rengas kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi yang di berikan kepada responden dengan

menggunakan teknik pengukuran yang sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari

Kunto (2003:171), sebagai berikut :

Sangat Baik : 76 - 100 %

Baik : 51 - 75 %

Cukup baik : 26 – 50%

Tidak baik : 0 – 25 %

Sangat tidak baik : di bawah 0 - 25%

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan yaitu tentang fungsi kepala Desa sebagai Administrator pembangunan di Desa pulau Rengas kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Tinjauan Sejarah**

Desa pulau rengas merupakan salah satu Desa yang terdapat di kecamatan pangean kabupaten Kuantan Singingi. mayoritas dari penduduk desa tersebut adalah penduduk asli desa yang mempunyai bermacam-macam suku Diantaranya suku melayu, paliang, pintu gobang, camin, mandailiang dan gontiang. suku-suku ini di kepalai oleh seorang kepala suku yang di beri nama Niniak Mamak. Niniak Mamak mempunyai peran yang sangat penting dalam suku misalnya menyelesaikan perselisihan antara sesama masyarakat yang mempunyai suku yang sama atau dengan masyarakat lain yang berbeda suku. Bisanya suku sesuai dengan garis keturunan ibu, suku ini berguna untuk meyatukan masyarakat dan membedakan mana saudara seibu dan mana saudara yang tidak seibu walaupun mempunyai beragam suku masyarakat Desa pualau reangas tetap selalau hidup rukun, yang mana pada setiap tahunnya suku-suku yang ada di desa tersebut berkumpul di sebuah balai adat. Dengan adanya pertemuan setiap tahunnya ini dan di dorong oleh faktor pendukung seperti infrastruktur dan jumlah penduduk yang telah memadai untuk di mekarkan dan di pecah dari desa induk untuk menajdi sebuah desa masyarakat berinisiatif untuk memekarkan diri menjadi sebuah desa yang di namakan Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **4.2. Keadaan Geografis**

Desa pulau rengas merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan pangean kabupaten Kuantan Singingi. desa ini berada di pinggir kecamatan pangean. Adapun yang menjadi batas-batas wilayah di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sukaping Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Padang Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Pauh Angit Ujung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Jarak tempuh antara Desa Pulau Rengas dengan kecamatan pangean adalah 10 km, sedangkan jarak dengan Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi (Taluk Kuantan) adalah 35 km dan jarak ke Ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru) adalah 190 km. dan Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ini terdiri dari 3 Dusun dan pola tata dusun di pengaruhi oleh keadaan geografisnya yang merupakan daerah aliran sungai kuantan, yaitu pola perkembangan yang berkelompok dan menyebar memanjang mengikuti jalan Desa dan Sungai Kuantan yang melalui Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Jika di lihat dari tekstur tanah yang ada di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah Dataran rendah yang mudah terkena banjir ketika musim penghujan datang. Kemudian keadaan iklim di desa pulau rengas kecamatan pangean kabupaten Kuantan Singingi adalah beriklim tropis di mana terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Selanjutnya untuk lebih jelas tentang luas wilayah Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.I : Luas Wilayah Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Dusun	Luas Wilayah Desa
1	Rengas ujung I	3500 M
2	Rengas tengah II	3000 M
3	Rengas durampak III	3000 M
<b>Jumlah (Km)</b>		<b>9500 M</b>

*Sumber Data : Kantor Kepala Desa tahun 2011*

Dari tabel diatas dapat kita lihat luas keseluruhan Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 9500 M yang terdiri dari tiga Dusun. Keadaan permukaan tanah atau topografi sebagian besar terdiri dari dataran rendah di sepanjang aliran Sungai Batang Kuantan. Dengan adanya hal seperti ini masyarakat desa banyak yang memanfaatkannya untuk lahan pertanian seperti tanam padi dan sawit.

### 4.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah 896 Jiwa. Di Desa Pulau Rengas penduduknya relative sedikit karna dengan luas wilayahnya yang hanya 9,5 Km. penduduk yang ada di Desa pulau Rengas banyak terdapat di dusun tengah walaupun dengan luas wilayahnya relative lebih kecil dari pada Dusun ujung I dan sebagian penduduk lainnya berada di dusun tengah II dan dusun durampak III. Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk desa pulau Rengas kecamatan pangean kabupaten kuantan singngi dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV.2. : Jumlah Penduduk Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Dusun	Jumlah (Jiwa)
1	Rengas ujung I	255
2	Rengas tengah II	383
3	Rengas durampak III	258
<b>Jumlah (km)</b>		<b>896</b>

*Sumber Data : Kantor Kepala Desa tahun 2011*

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah penduduk yang tersebar di antara tiga dusun yang ada di Desa pulau rengas kecamatan Pangean jumlahnya tidak jauh berbeda. Dengan demikian untuk melihat keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa pulau rengas kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dapat kita lihat pada tabel IV.3 di bawah ini.

**Tabel IV.3 : Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Dusun	Jumlah (Jiwa)	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Rengas ujung I	117	138
2	Rengas tengah II	179	204
3	Rengas durampak III	132	126
<b>Jumlah</b>		<b>428</b>	<b>468</b>

*Sumber data : Kantor kepala desa tahun 2011*

Tabel IV.3 diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak perempuan dari pada laki-laki.

**Tabel IV.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

NO	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0-4 Tahun	73	8,14%
2	5-9 Tahun	58	6,47%
3	10-14 Tahun	88	9,82%
4	15-19 Tahun	110	12,27%
5	20-24 Tahun	117	13,10%
6	25-29 Tahun	183	20,42%
7	30-34 Tahun	132	14,80%
8	35-39 Tahun	78	8,70/%
9	40 Tahun Keatas	57	6,36%
<b>Jumlah</b>		<b>896</b>	<b>100%</b>

*Sumber : kantor desa pulau rengas kecamatan pangean 2011*

Dari tabel di atas 4.3 menunjukan bahwa penduduk yang terbesar menurut golongan umur di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean adalah kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 20,42% dan kemudian disusul oleh kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 14,80%, selanjutnya kelompok umur 20-24 yaitu 13,10% dan seterusnya 15-19 tahun sebanyak 12,27% dan

seterusnya kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 9,82% selanjutnya 35-39 tahun sebanyak 8,70% dan kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 8,14% dan yang terakhir kelompok umur 40 tahun keatas sebanyak 6,36%.

#### **4.4 Mata Pencaharian**

Mata pencaharian merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mata pencaharian penduduk desa pulau rengas kecamatan pengean kabupaten Kuantan Singingi beraneka ragam, dan sebagian besar penduduk Desa ini hidup sebagi petani dan berkebun. Selain itu ada juga yang Berdagang, Guru, PNS, pegawai swasta, polri, buruh tani, beternak, montir sepeda motor dan lain sebagainya. Namun demikian masyarakat desa pulau rengas dalam kesehariannya juga bekerja sebagai buruh bangunan dan penambang pasir yang ada di lantaran Sungai Batang Kuantan. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk desa Pulau Rengas dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel IV.5. : Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	450	50,22 %
2	PNS	19	2,12%
3	Pegawai Swasta	9	1,00%
4	TNI/POLRI	2	0,22%
5	Buruh Tani	27	3,01%
6	Peternak	12	1,33%
7	Pedagang	13	1,45%
8	Montir	4	0,46%
9	Pelajar	310	34,59%
10	Pengangguran	17	1,89%
11	Penambang Pasir	13	1,45%
<b>Jumlah</b>		<b>896</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : kantor kepala desa pulau rengas tahun 2011*

Dari tabel IV.4 di atas dapat dilihat bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada di Desa pulau rengas terdapat 450 orang (50,22%) bekerja sebagai petani, 19 orang (2,12%) bekerja sebagai PNS, 9 orang (1,00%) Pegawai swasta, 2 orang (0,22%) bekerja sebagai TNI/POLRI, 27 orang (3,01%) bekerja sebagai buruh tani, 12 orang (1,33%) sebagai peternak, 13 orang (1,45%) sebagai pedagang, 4 orang (0,46%) sebagai montir, 310 orang (34,59%) sebagai pelajar, 13 orang (1,45%) sebagai penambang pasir, 17 orang (1,89%) Pengangguran.

#### **4.5 Kehidupan Sosial Keagamaan**

Memeluk agama merupakan hak azasi dasar dari setiap individu. Kebebasan beragama di Negara republic Indonesia diatur dalam UUD 1945 Dalam pasal 29, sikap yang perlu di kembangkan dalam pasal 29 UUD 1945

tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampur adukan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat desa pulau rengas adalah beragama Islam yaitu 99% kemudian Kristen 1%. Penduduk yang non muslim biasanya adalah pendatang dari luar daerah atau kabupaten kota. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.6. : Jumlah Penduduk Desa Pulau Rengas berdasarkan agama dan Kepercayaan yang di anutnya.**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	891	99,44%
2	Kristen	5	0,56%
<b>Jumlah</b>		<b>896</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : kantor kepala desa pulau rengas tahun 2011*

Untuk menunjang rutinitas masyarakat dalam menjalankan ibadah sebagai umat beragama masyarakat desa perlu sarana tempat beribadah. Adapun jumlah tempat ibadah di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV.7. : Jumlah Tempat ibadah di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Musollah / Surau	5	83,33%
2	Mesjid	1	16,67%
3	Gereja	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : kantor kepala desa pulau rengas tahun 2011*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana umat Islamlah yang banyak terdapat di Desa Pulau Rengas tersebut yaitu musollah/surau, dan mesjid. Sedangkan tempat ibadah agama lain di Desa

pulau rengas ini tidak ada. Hal ini dikarenakan oleh sedikitnya jumlah penganut agama lain yang berada di desa tersebut, yang hanya berjumlah 5 orang.

#### 4.6 Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan berkembang baik di desa pulau rengas kecamatan pangean. Karena pendidikan ini merupakan bagian terpenting bagi masyarakat dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia. Pendidikan perlu di tunjang oleh sarana prasarana yang berguna untuk proses belajar dan mengajar. Sarana pendidikan seperti gedung-gedung sekolah yang ada di desa pulau rengas kecamatan pangean mulai dari tingkat paud sampai dengan SLTA. Untuk mengetahui lebih lanjut jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa pulau Rengas kecamatan pangean dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.8. : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	1	-	1
2	SD	1	-	1
3	MDA	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>		<b>3</b>

*Sumber data : kantor kepala desa pulau rengas tahun 2011*

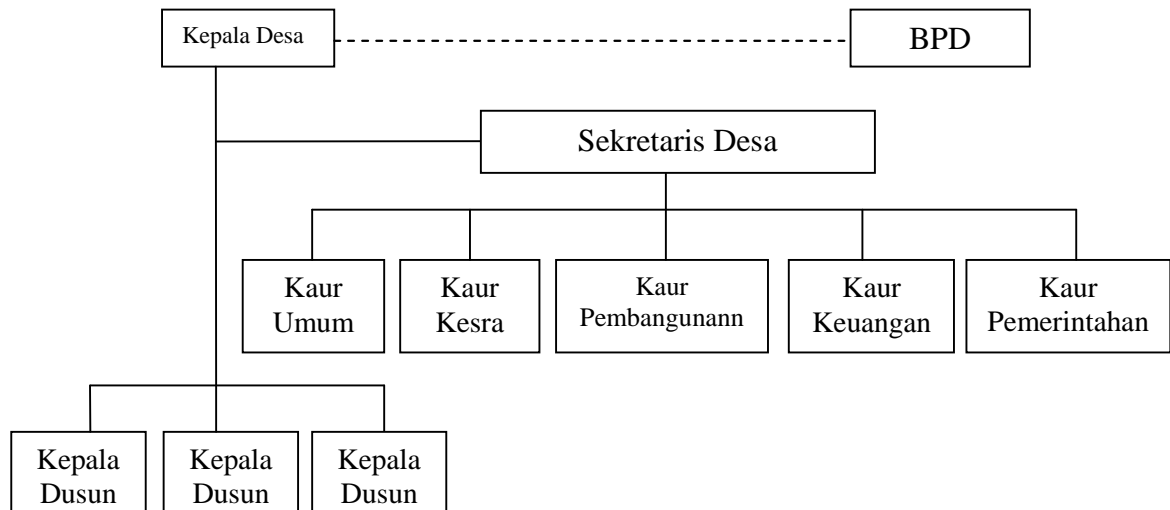
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa di sarana dan prasara yang ada di desa pulau rengas hanya memiliki 1 taman kanak-kanak (TK), 1 Sekolah Dasar (SD) yang berada di Dusun Tengah II, dan mempunyai 1 MDA. Yang berada di Dusun Ujung I.

#### 4.7 Struktur Pemerintahan

Pemerintah memiliki peran penting dalam membangun dan memberikan pelayanan berbagai kepentingan umum kepada masyarakat mulai dari masalah keamanan, kesehatan, kependudukan, serta ketertiban dan lain sebagainya.

Menurut Sondang p. siagian suatu organisasi yang bagus menciptakan dan mendudukan orang-orang dalam satu jabatan. Untuk mengetahui suatu struktur organisasi pemerintah di Desa Pulau Rengas kecamatan pangean kabupaten Kuantan Singingi dapat kita lihat pada struktur berikut ini :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Rengas**  
**Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**



Berdasarkan struktur diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi dalam struktur Organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

### 1. Kepala Desa

- a. Kedudukan : sebagai pelaksana penyelenggara Pemerintahan Desa
- b. Tugas : menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan pemerintah dan pembinaan masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.
- c. Fungsi : melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, membina perekonomian Desa, koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

### 2. Sekretaris Desa.

- a. Kedudukan : Sebagai unsur staf membantu bidang Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa.
- b. Tugas : Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan serta pelayanan ketata usahaan Desa.
- c. Fungsi : Melaksanakan tata kearsipan, urusan surat menyurat, melaksanakan keuangan dan melaksanakan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas Kepala Desa dalam segala hal bila Kepala Desa tidak bisa mengikuti hal tersebut.

### 3. Kepala Urusan

- a. Kedudukan : sebagai tugas pembantu tugasnya masing-masing.

- b. Tugas : melaksanakan kegiatan ketata usahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.
  - c. Fungsi : melaksanakan pencatatan, pengumpulan , pengelolaan data dan informasi yang menyangkut bidang penyusunan tugasnya masing-masing.
4. Kepala Dusun
- a. Kedudukan : Sebagai pembantu kepala desa dalam wilayah kerjanya.
  - b. Tugas : menjalankan kegiatan yang di limpahkan oleh kepala Desa, melaksanakan pemerintah Desa dibawah kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
  - c. Fungsi : melaksanakan kegiatan pemerintah, dan pembangunan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. (peraturan daerah kabupaten Kuantan Singingi no 2 tahun 2009)

## **BAB V**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **5.1. Identitas Responden**

Identitas responden sangat bermanfaat dalam suatu penelitian, guna untuk mengetahui latar belakang responden antara lain : mengetahui tingkat pendidikan, golongan umur atau usia, jenis kelamin, dan pekerjaan, untuk itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan identitas responden dilihat dari:

##### **5.1.1 Tingkat Pendidikan**

Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat di ketahui pada tabel berikut ini :

**Tabel V.I. : Tingkat Pendidikan responden masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Tamat SD	11	17,46%
2	Tamat SLTP	15	23,80%
3	Tamat SLTA	27	42,85%
4	STARATA	3	4,76%
5	SARJANA	7	11,11%
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012*

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan responden di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, di mana yang paling banyak adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTA sebanyak 27 Orang atau 42,85%,

selanjutnya tamat SLTP sebanyak 15 orang atau 23,80% dan tamat SD 11 orang atau 17% , den sarjana sebanyak 7 orang atau 11,11 % kemudian tamatan Strata hanya 3 orang atau 4,76 %.

Hal ini sesuai dengan data yang di peroleh dari Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, di mana masyarakat Desa pulau rengas kecamatan pangean banyak yang berpendidikan hanya sampai tingkat SLTA, sedangkan responden tamatan Sarjana dan strata hanya beberapa orang saja, karena pada umumnya masyarakat yang berpendidikan tinggi tidak berdomisili di kampung hanya sebagian kecil saja yang tinggal di kampung halaman.

### 5.1.2. Golongan Umur

Adapun golongan umur atau usia responden pada penelitian ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel .V.2. : Golongan Umur Responden Masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Golongan Umur/ Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30 Tahun	15	23,80%
2	31-40 Tahun	28	44,44%
3	41-50 Tahun	17	26,98%
4	51 Tahun Keatas	3	4,76%
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan,2012*

Dari tabel di atas dapat di ketahui golongan umur atau usia responden pada penelitian ini lebih banyak adalah responden yang memiliki golongan umur atau usia 31-40 Tahun sebanyak 28 orang atau 44,44 % , karena menurut Penulis pada umur ini seseorang bisa



membarikan saran dan ide baru dan bijaksana, selanjutnya responden yang memiliki golongan umur atau usia 41-50 Tahun sebanyak 17 orang atau 26,98%, kemudian golongan umur atau usia 20-30 tahun sebanyak 15 orang atau 23,80%, dan yang paling sedikit adalah responden yang memiliki golongan umur atau usia 51 tahun keatas sebanyak 3 orang atau 4,76%.

### 5.1.3 Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat di ketahui pada tabel sebagai berikut :

**Tabel.V.3. : Jenis kelamin Responden Masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.**

NO	Jenis kelamin	jumlah	Persentase
1	Laki – laki	50	79,36%
2	Perempuan	13	21,63%
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan, 2012*

Dari tabel di atas dapat di ketahui jenis kelamin responden di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, yang paling banyak adalah responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 50 orang atau 79,36%, dan selebihnya adalah responden perempuan sebanyak 13 orang atau 21,63%. Alasan penulis mengambil lebih banyak sampel laki-laki dibanding perempuan karena laki-laki mudah dalam di mintai informasi atau keterangan mengenai penelitian dan pada umumnya mereka mudah untuk dijumpai di rumah ataupun di luar rumah, dan laki-laki yang

lebih aktif di desa pulau rengas kecamatan pangean ini sedangkan sampel untuk perempuan sulit di temui dalam meminta keterangan atau informasi mereka juga sulit untuk di temui karena pada umumnya pada siang hari mereka pergi kesawah atau ladang dan pada sore hingga malamnya mereka sibuk mengurus anak dan rumah tangganya sehingga sulit untuk diminta informasi mengenai penelitian ini.

## **5.2. Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa**

Sebagaimana telah di jelaskan pada BAB terdahulu bahwa Kepala Desa harus mampu mengimplementasikan fungsinya dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan, maupun menyelenggarakan berbagai pemerintahan secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diperlukan seorang pemimpin atau kepala desa yang memiliki kemampuan sesuai dengan fungsinya sebagai administrator pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada Desa Pulau rangas kecamatan pangean kabupaten kuantan Singingi keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa yang ada di wilayahnya dilihat dari kemampuan kepala Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai Administrator pembangunan di Desa yang di pimpinya, yaitu Sebagi berikut :

### **5.2.1 Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan**

#### **A. Menggerakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa**

1. Mengerakan kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayahnya mempunyai peran yang sangat penting dalam

menjalankan roda pemerintahan di Desa dan di tuntut untuk menyelenggarakan tugasnya dalam manyeylenggarakan pemerintah Desa maupun tugas - tugas kemasyarakatan lainnya.untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V.4 : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam menggerakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa Di pulau Rengas**

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	17	26,98%
2	Baik	28	44,44%
3	Cukup baik	12	19,04%
4	Tidak baik	6	9,52%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Keterangan :Dari Tabel V.4 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dalam menggerakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa di Desa pulau rengas kecamatan pengean kabupaten kuantan Singingi tergolong Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Baik” sebanyak 28 orang atau 44,44%, tanggapan responden “Sangat Baik” 17 orang atau 26,98%, dan tanggapan responden “cukup Baik” sebanyak 12 orang atau 19,04% Selanjutnya tanggapan yang menjawab “tidak baik” sebanyak 6 orang atau 9,50%. Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi Kepala Desa menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa Di pulau Rengas. Sudah berjalan dengan Baik. Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.4. yang ternyata responden menjawab sebanyak 28 orang atau 44,44%. Sudah setuju terhadap pelaksanaan fungsi kepala desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa Di pulau Rengas.

2. Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa

Demi Efisiensi dan Efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Desa harus didukung dengan Tata usaha yang benar, hal ini tidak terlepas dari aparatur pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang ada di desa. Untuk lebih jelasnya mengenai tanggapan responden terhadap fungsi kepala Desa dan perangkat Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V.5 : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa**

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	14	22,22%
2	Baik	25	39,68%
3	Cukup baik	16	25,36%
4	Tidak baik	8	12,69%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.5 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dan perangkat Desa dalam dalam menyelenggarakan urusan pemerintah Desa Desa di Desa pulau rengas kecamatan Pengean Kabupaten Kuantan Singingi Tergolong Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Baik” sebanyak 25 orang atau 39,68%, tanggapan responden “Sangat Baik” 14 orang atau 22,22%, dan tanggapan responden “cukup Baik” sebanyak 16 orang atau 25,39% Selanjutnya tanggapan yang menjawab “tidak baik” sebanyak 8 orang atau 12,69%. Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uruaian di atas, dapat di simpulkan bahwa Kepala Desa dan perangkat desa Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa Di pulau Rengas. sudah berjalan dengan Baik. Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.5. yang ternyata responden menjawab sebanyak 25 orang atau 39,68%. Sudah setuju terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dan

perangkat desa Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Di pulau Rengas.

3. Kepala Desa dalam menanggapi Perangkat Desa yang tidak Menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa kepala Desa Sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu wilayah desanya harus menaati dan menegakan seluruh peraturan perundangan. Supaya tercapainya tujuan urusan pemerintahan desa. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V.6 : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam Menanggapi perangkat Desa yang tidak Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Desa**

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	12	19,04%
2	Baik	14	22,22%
3	Cukup baik	27	42,85%
4	Tidak baik	10	15,87%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.6 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dalam menanggapi perangkat Desa yang tidak menyelenggrakan urusan pemerintah Desa tergolong Cukup Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sanagt Baik” sebanyak 12 orang atau 19,04%, tanggapan responden “Baik” 14 orang atau 22,22%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 27 orang atau 42,85% Selanjutnya tanggapan yang menjawab “tidak baik”

sebanyak 10 orang atau 15,87%. Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam menanggapi perangkat Desa yang tidak menyelenggarakan urusan pemerintah Desa Di pulau Rengas. Cukup Baik . Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.6. yang ternyata responden menjawab sebanyak 27 orang atau 42,85%. Kurang setuju terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dan perangkat desa Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Di pulau Rengas.

4. Kepala Desa Melibatkan Masyarakat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa.

Di desa pulau rengas kecamatan pengean kabupaten kuantan Singingi. Masyarakat Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Desanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL V.7 : Tanggapan Responden terhadap fungsi Kepala Desa Melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan pemerintah Desa Pulau Rengas**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	19	30,15%
2	Baik	17	26,98%
3	Cukup baik	18	28,57%
4	Tidak baik	9	14,28%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.7 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dalam melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Desa tergolong Sangat Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 19 orang atau 30,15%, tanggapan responden “Baik” 17 orang atau 26,98%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 18 orang atau 28,57% Selanjutnya tanggapan yang menjawab “tidak baik” sebanyak 9 orang atau 14,28%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Desa Di pulau Rengas. Sudah Sangat Baik . Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.7. yang ternyata responden menjawab sebanyak 19 orang atau 30,15%. Sangat setuju terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dalam melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Di pulau Rengas.

Dari hasil tanggapan responden mengenai kemampuan kepala Desa dalam mengerjakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. Jika di lihat dari persentase tanggapan responden jawabanya sangat bervariasi



untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dan rekapitulasi di bawah ini :

**Tabel V.8 : Rekapitulasi tanggapan responden mengenai fungsi Kepala Kepala Desa menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa**

No	Fungsi kepala Desa menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa	Tanggapan responden					Jumlah
		SB	B	CB	TB	STB	
1	Menggerakkan kegiatan	17	28	12	6	-	63
2	Menyelenggarakan urusan	14	25	16	8	-	63
3	Menanggapi permasalahan	12	14	27	10	-	63
4	Melibatkan masyarakat	19	17	18	9	-	63
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>84</b>	<b>73</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>252</b>
<b>Persentase</b>		<b>24,60 %</b>	<b>33,33 %</b>	<b>28,96 %</b>	<b>13,09 %</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Keterangan :

SB : Sangat Baik

B : Baik

CB : Cukup baik

TB : Tidak Baik

STB : Sangat Tidak Baik

Dari Tabel V.8 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dalam menggerakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa tergolong Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sanagt Baik” sebanyak 62 orang atau 24,60%, tanggapan responden “Baik” 84 orang atau 33,33%, dan tanggapan

responden “Cukup Baik” sebanyak 73 orang atau 28,96%. Selanjutnya tanggapan yang menjawab “tidak baik” sebanyak 8 orang atau 13,09%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam menggerakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa Di pulau Rengas. Sudah Baik . Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.8. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 84 orang atau 33,33%. Setuju Terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dalam melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Di pulau Rengas.

Berdasarkan Obserpasi penulis dilapangan bahwa kepala Desa telah menggerakan kegiatan dalam rangka penyelenggraan urusan pemerintahan Desa dengan baik seperti memberikan surat pengantar dalam membuat kartu tanda penduduk, dan memberikan surat balasan izin risert kepada penulis.

Menurut Hanif Nurcholis (2011 :135) Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah Desa harus didukung dengan tata usaha yang benar, tata usaha adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerinthan Desa yang disebut dengan

administrasi Desa. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada buku Adaministrsi Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan Kepala Desa Pulau Rengas (Tanggal 30 April 2012), Sebelum menyelenggarakan urusan pemerintah terlebih dahulu kepala Desa menjelaskan kepada aparatur pemerintah desanya apa maksud dan tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Kemudian melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat Desa di Desa pulau rengas kecamatan pengean kabupaten kuantan Singingi. hal ini di lakukan oleh kepala Desa bertujuan untuk memperoleh Saran atau informasi agar penyelanggaraaan urusan pemerintahanya berjalan dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan ketua BPD Desa Pulau Rengas (Tanggal 30 April 2012) Mereka mengatakan bahwa Kepala Desa telah menjelaskan tujuan penyelenggaraan urusan pemerintah Desa kepada Aparatur pemerintah Desanya, dan Kepala Desa telah membuat langkah-langkah supaya penyelenggaraan urusan pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien.

Dari Wawancara yang di atas penulis menyimpulkan bahwa Kepala Desa Telah melakukan Fungsinya dengan baik dalam menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa di Desa Pulau Rangas.

#### **B. Menggerakkan Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa merupakan suatu bagian integral Pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan potensi yang sangat besar untuk menunjang pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V.9 : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa**

<b>No</b>	<b>Tanggapan responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat baik	7	11,11%
2	Baik	15	23,80%
3	Cukup baik	29	46,03%
4	Tidak baik	12	19,04%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.9 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dalam menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa tergolong cukup baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sanagt Baik”

sebanyak 7 orang atau 11,11%, tanggapan responden “Baik” 15 orang atau 23,80%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 29 orang atau 46,03%. Selanjutnya tanggapan yang menjawab “tidak baik” sebanyak 12 orang atau 19,04%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam menggerakan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa Di pulau Rengas. Sudah cukup baik. Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.9. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 29 orang atau 46,03%. Setuju Terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dalam menggerakan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## 2. Pelaksanaan pembangunan yang di lakukan oleh kepala Desa Pulau Rengas.

Dalam rangka Pelaksanaan pembangunan Desa harus mempunyai perencanaan yang harus di capai dan melibatkan semua unsur masyarakat desa dan perangkat Desa. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang di lakukan oleh kepala Desa dapat di rasakan langsung oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**TABEL V.10 : Tanggapan responden terhadap upaya yang di lakukan kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang di lakukan oleh kepala Desa.**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	5	7,93%
2	Baik	12	19,04%
3	Cukup baik	33	52,38%
4	Tidak baik	13	21,63%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.10 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang di lakukan oleh kepala Desa. Tergolong Cukup baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sanagt Baik” sebanyak 5 orang atau 7,93%, tanggapan responden “Baik” 12 orang atau 19,04%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 33 orang atau 52,38% Selanjutnya tanggapan yang menjawab “tidak baik” sebanyak 13 orang atau 21,63%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uruaian di atas, dapat di simpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang di lakukan oleh kepala Desa Di pulau Rengas. Sudah cukup baik. Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.10. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 33 orang atau 52,38%. Cukup Setuju Terhadap pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang di lakukan oleh kepala Desa

3. Melakukan pembinaan terhadap perangkat desa dan masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembinaan yang dilakukan oleh kepala Desa dalam pembangunan merupakan usaha untuk lebih memahami bagaimana penyelenggaraan pembangunan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V.11. : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam melakukan pembinaan terhadap perangkat Desa dan masyarakat dalam pembangunan desa pulau rengas**

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	8	12,69%
2	Baik	12	19,04%
3	Cukup baik	28	44,44%
4	Tidak baik	15	24,80%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.11. diatas dapat diketahui fungsi kepala Desa Dalam melakukan pembinaan terhadap perangkat Desa dan masyarakat dalam pembangunan desa pulau rengas. tergolong Cukup baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 8 orang atau 12,69%, tanggapan responden “Baik” 12 orang atau 19,04%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 28 orang atau 44,44% Selanjutnya tanggapan yang menjawab “tidak baik” sebanyak 15 orang atau 24,80%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi Kepala Desa Dalam melakukan pembinaan terhadap perangkat Desa dan masyarakat dalam pembangunan Di pulau Rengas. Sudah Cukup Baik . Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.11. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 28 orang atau 44,44% Kurang Setuju Terhadap pelaksanaan Fungsi kepala Desa Dalam melakukan pembinaan terhadap Perangkat Desa dan masyarakat dalam pembangunan Di pulau Rengas.

4. Menanggapi pelaksanaan pembangunan yang tidak terealisasi dengan baik di Desa pulau rengas.

Kepala mempunyai wewenang untuk mengawasi dan menanggapi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desanya yang disebut dengan pengkoordinasian pembangunan secara partisipatif untuk tercapainya hasil pembangunan yang maksimal. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V.12 : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Menanggapi pelaksanaan pembangunan yang tidak Terealisasi dengan baik di Desa pulau rengas**

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	6	9,52%
2	Baik	11	17,46%
3	Cukup baik	27	42,85%
4	Tidak baik	19	30,15%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*



Dari Tabel V.12 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dalam menggerakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa tergolong Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sanagt Baik” sebanyak 16 orang atau 25,39%, tanggapan responden “Baik” 21 orang atau 33,33%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 18 orang atau 28,57% Selanjutnya tanggapan yang menjawab “tidak baik” sebanyak 8 orang atau 12,69%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uruaian di atas, dapat di Simpulkan bahwa fungsi kepala Desa Dalam menggerakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa Di pulau Rengas. Sudah Cukup Baik . Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.12. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 27 orang atau 42,85% Kurang Setuju Terhadap pelaksanaan Fungsi kepala Desa Dalam menggerakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa

Dari hasil tanggapan responden mengenai kemampuan kepala Desa dalam menggerakan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Jika di lihat dari persentase tanggapan Responden jawabanya sangat berparisi untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dan rekapitulasi di bawah ini :

**Tabel V. 13. : Rekapitulasi tanggapan responden mengenai Fungsi Kepala Desa dalam Menggerakkan pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Desa**

No	fungsi Kepala Desa dalam menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa	Tanggapan responden					Jumlah
		SB	B	CB	TB	STB	
1	Menggerakkan kegiatan	7	15	29	12	-	63
2	Menyelenggarakan urusan	5	12	33	13	-	63
3	Menanggapi permasalahan	8	12	28	15	-	63
4	Melibatkan masyarakat	6	11	27	19	-	63
<b>Jumlah</b>		26	50	117	59		252
<b>Persentase</b>		<b>10,31 %</b>	<b>19,84 %</b>	<b>46,42 %</b>	<b>23,41 %</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Keterangan :

SB : Sangat Baik

B : Baik

CB : Cukup baik

TB : Tidak Baik

STB : Sangat Tidak Baik

Dari Tabel V.13. diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dalam menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat tergolong Cukup Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sanagt Baik” sebanyak 26 orang atau 10,31%, tanggapan responden “Baik”50 orang atau 19,84%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 117 orang atau 46,42% Selanjutnya tanggapan yang

menjawab “tidak baik” sebanyak 59 orang atau 23,41%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat di Simpulkan bahwa Fungsi kepala Desa dalam menggerakan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Di pulau Rengas. Sudah cukup baik . Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.13. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 29 orang atau 46,03% kurang setuju Terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dalam menggerakan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Di pulau Rengas.

Berdasarkan Obserpasi penulis dilapangan Kepala Desa telah menggerakan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat seperti koperasi Desa yang di namakan *Baromban* memberikan pinjaman terhadap usaha kecil masyarakat seperti pembuatan Peci dengan kesepakatan pada bulan berikutnya masyarakat mengembalikan dengan cara mengencicil pinjamanya tersebut dengan tujuan dana ini bisa digulir untuk pinjaman masyarakat lainnya. akan tetapi masyarkat desa masih banyak yang tidak mengembalikan kepada pihak koperasi serta kurangnya ketegasan pihak koperasi Desa dalam menindak masyarakat yang tidak membayar cicilan pinjamannya sehingga koperasi Desa ini kurang berjalan dengan baik.

Menurut S.P Siagian (2006 : 91) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkain usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan di laksanakan secara sadar oleh satu Bangsa Negara dan pemerintahan dalam rangka pembinaan Bangsa.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan Kepala Desa Pulau Rengas (Tanggal 30 April 2012), Kepala Desa telah Menggerakan pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan cara membina Aparatur Pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, kepala Desa sebagai pemimpin yang berada dalam suatu wilayah Desanya selain memberikan pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahnya dan mengikuti kegiatan pelaksanaan pembangunan yang ada di Desanya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan Tokoh masyarakat dan Sekretaris Desa mereka mengatakan bahwa Kepala Desa telah melakukan pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa akan tetapi Kepala Desa kurang mampu dalam melaksanakan pengawasan dan pengontrolan terhadap pembangunan apa saja yang akan lakukan dalam wilayah Desanya. Dan menurut Sekretaris Desa juga menegaskan kepada peneliti bahwa Kepala Desa kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang telah diambilnya atau kepala Desa terkesan plin-plan. Misalnya dalam menetapkan pembangunan yang mana harus di kerjakan, setelah menetapkan hal tersebut kepala desa merubahnya

lagi, sehingga menyebabkan Aparatur Desa dan Masyarakat kurang bersemangat menjalankan Pembangunan Desa dan bekerja dengan kesan apa adanya, hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Pulau Rengas kurang maksimal.

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Kepala Desa telah menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Di pulau Rengas. akan tetapi masih kurang maksimal. Di karenakan kepala Desa kurang mampu dalam melaksanakan pengawasan, pengontrolan dalam pelaksanaan pembangunan dan kurang konsisten dengan apa yang telah di tetapkannya.

### **C. Mempasilitasi Upaya Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa**

1. Peran kepala Desa dalam mempasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.

Dalam mempasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat sangat di butuhkan peran kepala Desa sebagai pemimpin dalam desa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V. 14 : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam Mempasilitasi upaya peningkatan Partisipasi Dan Swadaya Masyarakat**

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	8	12,69%
2	Baik	10	15,87%
3	Cukup baik	29	46,03%
4	Tidak baik	16	25,39%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.14 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dalam mempasilitasi upaya peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat tergolong Cukup Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sanagt Baik” sebanyak 8 orang atau 12,69%, tanggapan responden “Baik” 10 orang atau 15,87%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 29 orang atau 46,03% Selanjutnya tanggapan yang menjawab “tidak baik” sebanyak 16 orang atau 25,39%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uruaian di atas, dapat di Simpulkan bahwa fungsi kepala Desa mempasilitasi upaya peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Di pulau Rengas. Sudah cukup baik . Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.14. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 29 orang atau 46,03% kurang setuju Terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dalam mempasilitasi upaya peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Di Pulau Rengas

2. Tanggapan masyarakat terhadap upaya yang di lakukan oleh Kepala Desa dalam meningkatkan Pertisipasi dan Swadaya Masyarakat.

Dengan adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi yang di lakukan oleh kepala desa sebagai pemimpin tertinggi yang berada dalam Desa. Hal ini tidak terlepas juga dari tanggapan masyarakat sebagai acuan untuk keberhasilan upaya yang di lakukan oleh kepala Desa. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V.15 : Tanggapan Responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam Tanggapan masyarakat untuk Meningkatkan partisipasi dan Swadaya masyarakat**

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	7	11,11%
2	Baik	11	17,46%
3	Cukup baik	28	44,44%
4	Tidak baik	17	26,98%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.15 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dalam penilaian masyarakat untuk Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat tergolong Cukup Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 7 orang atau 11,11%, tanggapan responden “Baik” 11 orang atau 17,46%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 28 orang atau 44,44% Selanjutnya tanggapan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 17 orang atau 26,98%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam penilaian masyarakat untuk Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat Di pulau Rengas. Sudah cukup baik. Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.15. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 28 orang atau 44,44% kurang setuju Terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dalam penilaian masyarakat untuk Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat Di Pulau Rengas.

3. Kepala Desa Menghimpun Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Sebagai modal Dana dalam Pembangunan Desa.

Demi tercapainya tujuan pembangunan yang telah di buat sebelumnya tidak terlepas dari keikutsertaan partisipasi dan swadaya masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V.16 : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam menghimpun partisipasi dan swadaya Masyarakat sebagai modal dana dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Pulau Rengas**

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	6	9,52%
2	Baik	9	14,28%
3	Cukup baik	32	50,79%
4	Tidak baik	16	25,39%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.16 diatas dapat diketahui fungsi kepala Desa dalam menghimpun partisipasi dan swadaya Masyarakat sebagai



modal dana dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Pulau Rengas tergolong Cukup Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 6 orang atau 9,52%, tanggapan responden “Baik” 9 orang atau 14,28%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 32 orang atau 50,79% Selanjutnya tanggapan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 16 orang atau 25,39%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam menghimpun partisipasi dan swadaya Masyarakat sebagai modal dana dalam pelaksanaan Pembangunan Di pulau Rengas. Sudah cukup baik. Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.16. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 32 orang atau 50,79% kurang setuju Terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dalam menghimpun partisipasi dan swadaya Masyarakat sebagai modal dana dalam pelaksanaan Pembangunan Di Pulau Rengas.

4. Kepala Desa dalam menumbuh kembangkan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.

Sebagai pemimpin dalam suatu wilayah Desa kepala Desa harus mampu menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat Desa sebagai salah satu usaha menunjang pembangunan yang ada di desa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V.17. : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam menumbuh kembangkan partisipasi dan Swadaya Masyarakat.**

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	8	12,69%
2	Baik	12	19,04%
3	Cukup baik	28	44,44%
4	Tidak baik	15	23,80%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.17 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dalam menumbuh kembangkan partisipasi dan Swadaya Masyarakat tergolong Cukup Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 8 orang atau 13%, tanggapan responden “Baik” 12 orang atau 19,04%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 28 orang atau 44,44 % Selanjutnya tanggapan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 15 orang atau 23,80%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat di Simpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam menumbuh kembangkan partisipasi dan Swadaya Masyarakat Di pulau Rengas. Sudah cukup baik . Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.17. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 28 orang atau 44.44% kurang setuju Terhadap pelaksanaan fungsi

kepala Desa dalam dalam menumbuh kembangkan partisipasi dan Swadaya Masyarakat Di Pulau Rengas.

Dari hasil tanggapan responden mengenai kemampuan Kepala Desa dalam memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan Swadaya masyarakat. Jika di lihat dari persentase tanggapan responden jawabanya sangat berparisi untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dan rekapitulasi di bawah ini :

**Tabel V. 18 : Rekapitulasi tanggapan responden mengenai Fungsi Kepala Desa dalam memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan Swadaya masyarakat**

No	Fungsi kepala Desa menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraa n urusan pemerintah Desa.	Tanggapan responden					Jumlah
		SB	B	CB	TB	STB	
1	Menggerakkan kegiatan	8	10	29	16	-	63
2	Menyelenggarakan urusan	7	11	28	17	-	63
3	Menanggapi permasalahan	6	9	32	16	-	63
4	Melibatkan masyarakat	8	12	28	15	-	63
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>42</b>	<b>117</b>	<b>64</b>	<b>-</b>	<b>252</b>
<b>Persentase</b>		<b>11,50 %</b>	<b>16,66 %</b>	<b>46,42 %</b>	<b>25,39 %</b>		<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Keterangan :

SB : Sangat Baik  
 B : Baik  
 CB : Cukup baik  
 TB : Tidak Baik  
 STB : Sangat Tidak Baik

Dari Tabel V.18 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dalam memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat tergolong Cukup Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 29 orang atau 11,50%, tanggapan responden “Baik” 42 orang atau 16,66%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 117 orang atau 46,42 % Selanjutnya tanggapan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 64orang atau 25,39%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat di Simpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat Di pulau Rengas. Sudah cukup baik . Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.18. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 117 orang atau 46,42% kurang setuju Terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dalam memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat Di Pulau Rengas.

Berdasarkan Obserpasi penulis dilapangan Kepala Desa telah memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan Swadaya masyarakat seperti gotong-royong lapangan bola kaki Desa dan

dalam musyawarah pembuatan rumah jalur kepala Desa telah melibatkan Aparatur Desa dan masyarakat akan tetapi masih banyak dari masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah tersebut.

Menurut Sriwahyuni (2000:78) Partisipasi artinya mengambil bagian atau turut serta dalam suatu kegiatan. yang di maksudkan oleh penulis di sini Meningkatkan Partisipasi masyarakat adalah kepala desa memberikan Hak kepada masyarakat , Sehingga Masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Kesempatan tersebut perlu diberikan karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan Taraf hidup masyarakat sesuai dengan yang mereka inginkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan Kepala Desa Pulau Rengas (Tanggal 30 April 2012), Kepala Desa telah Mempasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan Swadaya masyarakat. dengan cara melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan yang ada di desa. akan tetapi disini kepala Desa kesulitan dalam menyatukan partisipasi masyarakat karena faktor ekonomi masyarakat Desa yang masih rendah. Oleh karena itu masyarakat lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari pada ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa yang ada.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan Tokoh masyarakat Desa pulau rengas, mereka mengatakan bahwa kepala Desa sudah mempasilitasi upaya

peningkatan partisipasi dan Swadaya masyarakat, dengan dengan cara melibatkan masyarakat desa untuk Berpartisipasi Akan tetapi masih kurang efektif di karenakan kurangnya pengontrolan yang di lakukan oleh kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kurangnya evaluasi yang di berikan oleh kepala Desa sehingga mengakibatkan partisipasi dan swadaya masyarakat itu kurang berjalan secara maksimal.

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa kepala Desa telah memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat, Akan tetapi masih kurang maksimal di karenakan kurangnya pengontrolan yang di lakukan oleh kepala Desa terhadap upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.

#### **D. Menciptakan Suasana Ketentraman dan Ketertiban**

1. Keamanan dan ketertiban yang di Ciptakan oleh kepala desa.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara kepala desa, perangkat desa dan masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat berjalan lancar dan mempercepat proses pembangunan yang ada di desa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V.19 :   Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam menciptakan suasana ketentraman dan Ketertiban**

<b>No</b>	<b>Tanggapan responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat baik	5	7,93%
2	Baik	11	17,46%
3	Cukup baik	29	46,03%
4	Tidak baik	18	28,57%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.19 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa dalam menciptakan suasana ketentraman dan Ketertiban tergolong Cukup Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 5 orang atau 7,93%, tanggapan responden “Baik” 11 orang atau 17,46 %, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 29 orang atau 46,03% Selanjutnya tanggapan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 18 Orang atau 25,57%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat di Simpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam menciptakan suasana ketentraman dan Ketertiban masyarakat Di pulau Rengas. Sudah cukup baik . Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.19. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 29 orang atau 46,03% kurang setuju Terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dalam menciptakan suasana ketentraman dan Ketertiban Di Pulau Rengas.

## 2. Sistem keamanan yang di buat oleh kepala Desa

Sistem keamanan lingkungan diDesa berguna berguna menciptakan rasa aman terhadap masyarakat dari tindakan kejahatan, kerusakan, perjudian, pelacuran, kekerasan antar sesama masyarakat Desa dan Desa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V. 20 : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam membuat sistem keamanan Desa Pulau Rengas**

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	12	19,04%
2	Baik	13	21,63%
3	Cukup baik	21	33,33%
4	Tidak baik	17	26,98%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.20 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa Dalam membuat sistem keamanan Desa Pulau Rengas tergolong Cukup Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 12 orang atau 19,04%, tanggapan responden “Baik” 13 orang atau 22,63%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 21 orang atau 33,33% Selanjutnya tanggapan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 17 Orang atau 26,98%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat di Simpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam membuat sistem keamanan Desa di pulau Rengas. Sudah cukup baik. Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.20. yang



ternyata responden Menjawab sebanyak 21 orang atau 33,33% kurang setuju Terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dalam dalam membuat sistem keamanan Desa di pulau Rengas.

3. Tanggapan kepala Desa terhadap Perangkat Desa yang tidak ikut serta Dalam Menciptakan Ketentraman Desa.

Kepala Desa Sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu wilayah Desa mempunyai wewenang menanggapi dan memberikan tanggapan kepada perangkat desa yang tidak ikut serta dalam menciptakan suasana ketentraman Desa. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V.21 : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam menanggapi perangkat desa yang tidak ikut Serta dalam Menciptakan ketentraman**

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	13	21,63%
2	Baik	16	25,39%
3	Cukup baik	21	33,33%
4	Tidak baik	13	21,63%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.21 diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa Dalam menanggapi perangkat desa yang tidak ikut Serta dalam menciptakan ketentraman tergolong Cukup Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 13 orang atau 21,63%, tanggapan responden “Baik” 16 orang atau 25,39%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 21 orang atau 33,33 % Selanjutnya tanggapan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 13

Orang atau 21,63%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam menanggapi perangkat desa yang tidak ikut Serta dalam menciptakan ketentraman. Sudah cukup baik. Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.21. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 21 orang atau 33,33% kurang setuju Terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dalam menanggapi perangkat desa yang tidak ikut Serta dalam menciptakan ketentraman di Desa pulau rengas.

4. Menjalankan program siskamling yang di buat oleh kepala Desa.

Program Siskamling yang di buat oleh kepala Desa tidak akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat tidak ikut mendukung dan menjalankan program tersebut. Untuk itu masyarakat di ikut sertakan dalam menjalankannya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**TABEL V. 22 : Tanggapan responden terhadap fungsi Kepala Desa Dalam program siskamling yang di jalankan oleh Masyarakat**

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	6	9,52%
2	Baik	15	23,80%
3	Cukup baik	26	41,26%
4	Tidak baik	16	25,39%
5	Sangat tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Dari Tabel V.22 diatas dapat diketahui fungsi kepala Desa Dalam program siskamling yang di jalankan oleh masyarakat. tergolong

Cukup Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 6 orang atau 9,52%, tanggapan responden “Baik” 15 orang atau 23,80%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 26 orang atau 41,26 % Selanjutnya tanggapan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 16 Orang atau 25,39%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uraian di atas, dapat di Simpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam program siskamling yang di jalankan oleh masyarakat. Sudah cukup baik . Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.22. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 26 orang atau 41,26% kurang setuju Terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dalam dalam program siskamling yang di jalankan oleh masyarakat di Desa pulau rengas.

**Tabel V. 23 : Rekapitulasi tanggapan responden mengenai Fungsi Kepala Desa dalam menciptakan suasana Ketentraman dan Ketertiban**

No	Fungsi kepala Desa dalam menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban	Tanggapan responden					Jumlah
		SB	B	CB	TB	STB	
1	Menggerakkan kegiatan	5	11	29	18	-	63
2	Menyelenggarakan urusan	12	13	21	17	-	63
3	Menanggapi permasalahan	13	16	21	13	-	63
4	Melibatkan masyarakat	6	15	26	16	-	63
<b>Jumlah Rata-rata</b>		<b>36</b>	<b>55</b>	<b>97</b>	<b>64</b>	<b>-</b>	<b>252</b>
<b>persentase</b>		<b>14,28 %</b>	<b>21,82 %</b>	<b>38,49 %</b>	<b>25,39 %</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Keterangan :

SB : Sangat Baik

B : Baik

CB : Cukup baik

TB : Tidak Baik

STB : Sangat Tidak Baik

Dari Tabel V.23. diatas dapat di ketahui fungsi kepala Desa Dalam dalam menciptakan suasana Ketentraman dan Ketertiban tergolong Cukup Baik hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 36 orang atau 14,28%, tanggapan responden “Baik” 55 orang atau 21,82%, dan tanggapan responden “Cukup Baik” sebanyak 97 orang atau 38,49% Selanjutnya tanggapan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 64 Orang atau 25,39%. Dan Yang memberikan tanggapan “Sangat tidak baik “ tidak ada.

Menurut uruaian di atas, dapat di Simpulkan bahwa fungsi kepala Desa dalam menciptakan suasana Ketentraman dan Ketertiban. Sudah cukup baik . Hal ini dapat kita lihat pada tabel V.23. yang ternyata responden Menjawab sebanyak 97 orang atau 38,49% kurang setuju Terhadap pelaksanaan fungsi kepala Desa dalam dalam dalam menciptakan suasana Ketentraman dan Ketertiban di Desa pulau rengas.

Berdasarkan Obserpasi penulis, Kepala Desa telah menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan cara menentukan Satu orang masyarakat yang dipilih oleh kepala Desa , Aparatur Desa dan masyarakat sebagai ketua pemuda untuk menjaga

keamanan Desanya bersama masyarakat, baik itu permasalahan yang datang antar sesama masyarakat Desa maupun permasalahan yang datangnya dari luar Desa. Akan tetapi masih banyak masyarakat Desa yang tidak melibatkan ketua pemuda jika terjadi permasalahan yang terjadi antar Pemuda Desa.

menurut Hanif Nurcholis (2011 : 104) Pelayanan pemerintah Desa Berupa memberikan perlindungan kepada warga Desa adalah pelayanan yang berupa upaya pemerintah desa memberikan Rasa aman kepada warga Desa. Pemerintah Desa harus dapat menciptakan rasa aman kepada warganya dari tindak kejahatan, kerusakan dan bencana alam seperti pencurian, perampokan , perjudian, pelacuran, kekerasan warga, konflik antar warga atau kampung.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan Kepala Desa Pulau Rengas (Tanggal 30 april 2012), Kepala Desa telah menciptakan Suasana Ketentraman dan Ketertiban masyarakat desa dengan baik yaitu dengan cara membentuk suatu kesatuan keamanan lingkungan dengan melibatkan aparat pemerintah Desa dan masyarakat Desa. dalam musyawarah yang ada di Desa kepala desa selalu melibatkan masyarakat dan tindakanya selalu melibatkan masyarakat Desa

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Tanggal 30 April 2012) Mereka mengatakan bahwa

Kepala Desa telah menciptakan suasana keamanan dan ketertiban dengan melibatkan aparatur pemerintah desa dan masyarakat yang ada. Akan tetapi Kepala Desa hanya melibatkan masyarakat yang berpihak kepadanya dan mengambil keputusan dengan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan atau keperluan masyarakat banyak. Seharusnya kepala Desa dalam menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban Desa melibatkan semua golongan masyarakat Desa di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan memperhatikan kepentingan masyarakat demi terciptanya suasana ketentraman dan ketertiban tersebut.

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa kepala Desa telah menciptakan suasana Ketentraman dan Ketertiban. Akan tetapi masih belum maksimal karena belum melibatkan semua golongan masyarakat demi terciptanya ketentraman Desa.

**Tabel V.24. : Rekapitulasi Hasil Angket tentang pelaksanaan fungsi Kepala Desa sebagai Administrator pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SB	B	CB	TB	STB	
1	Menggerakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa.	62	84	73	33	-	252
2	Menggerakan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	26	50	117	59	-	252
3	Menggerakan upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat	29	42	117	64	-	252
4	Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat	36	55	97	64	-	252
<b>Jumlah Rata-Rata</b>		<b>153</b>	<b>231</b>	<b>404</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>1008</b>
<b>persentase</b>		<b>15,17 %</b>	<b>22,91 %</b>	<b>40,07 %</b>	<b>21,82 %</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : hasil penelitian lapangan 2012*

Selanjutnya untuk mengetahui hasil tabulasi dalam menilai jawaban responden pada masing masing pertanyaan dapat dilakukan dengan cara sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh suharsimi arikunto (2003:43) sebagai berikut :

Sangat baik	: 5 x 153 = 765
Baik	: 4 x 231 = 924
Cukup baik	: 3 x 404 = 1212
Tidak baik	: 2 x 220 = 440
Sangat tidak baik	: 1 x 0 = 0
	<hr/>
	1008      3341

$$F = 3341$$

$$N = 1008 \times 5 = 5040$$

$$P = \frac{3341}{5040} \times 100\% = 66,28\%$$

Dari tabel rekapitulasi seluruh indikator yang di gunakan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa fungsi kepala Desa sebagai administrator pembangunan di Desa Pulau rengas kecamatan pengean kabupaten kuantan singingi msuk dalam kategori **Baik** hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar 66,28%, atau berada pada interval 51-75%. Di katkan baik karena kepala Desa telah melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan sesuai peraturan daerah kabupaten kuantan singingi no 2 tahun 2009 tentang pedoman susunan tata kerja organisasi pemerintahan desa dalam pasal 11.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Fungsi kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan dengan mengambil sampel di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi” maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai Berikut :

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang di lakukan di desa pulaua rengas kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi dapat di simpulkan bahwa fungsi kepala Desa sebagai administrator pembangunan di Desa Pulau rengas kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi msuk dalam kategori ***Baik*** hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar 66,28%, atau berada pada interval 51-75%. Di katkan baik karena kepala Desa telah melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan sesuai peraturan daerah kabupaten kuantan singingi no 2 tahun 2009 tentang pedoman susunan tata kerja organisasi pemerintahan desa dalam pasal 11.

**Hambatan-Hambatan dalam pelaksanaan fungsi kepala Desa Sebagai Administrator Pembnagunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.**

1. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - a. Kurangnya pengawasan .dan pengontrolan yang di lakukan oleh Kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan.

- b. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembinaan yang dilakukan oleh kepala Desa.
  - c. Kurangnya Pemberdayaan dan Swadaya Masyarakat.
- 2. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.
  - a. Kurang Tanggapnya kepala Desa dalam menanggapi perangkat Desa yang tidak ikut serta dalam memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.
  - b. Kurangnya Partisipasi masyarakat terhadap upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- 3. Menciptakan Suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - a. Masih adanya perangkat Desa yang tidak ikut menciptakan Suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - b. Masyarakat Desa hanya mau ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban desa jika diberi honor atau gaji.
  - c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah keamanan dan ketertiban sehingga sulit untuk disatukan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **6.2. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis memberikan saran atau masukan terhadap kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.:

- 1) Di harapkan kepada kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu wilayah Desanya dapat melaksanakan pengawasan dan pengontrolan dalam pelaksanaan pembangunan dan harus konsisten dengan apa yang telah ditetapkan.
- 2) Kepala Desa di harapkan mampu memfasilitasi upaya peningkatan masyarakat dengan cara mengontrol dan mengevaluasi partisipasi dan Swadaya masyarakat Desa.
- 3) Demi ketentraman Desa hendaknya kepala Desa dapat melibatkan semua unsur golongan masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban yang ada dalam suatu Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wijaja,H.A.W, 2002, *Otonomi Daerah dan daerah Otonomi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada ; Jakarta
- Wijaja, H.A.W, 2003 *Otonomi Desa*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada ; Jakarta
- Suharto, Edi, 2005, *Formulasi Kebijakan*, Penerbit PT Bumi Aksara ; Jakarta
- Karta Samita, Ginanjar,1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, penerbit PT Pustaka ; Jakarta
- Sudriamunawar, Haryono, 2002 *Pembangunan Desa*, Penerbit PT Ikhtiar Baru ; Jakarta
- Kencana Syafi'I ,Inu, 2003, *Sistem Administrasi Repoblik Indonesia*, Penerbit PT Bumi Aksara ; Jakarta.
- Kansil,2001, *Pemerintahan Desa*, Penerbit PT alfabeta ; bandung
- Kartono ,Kartini, 2005, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT Raja Grafindo ; Jakarta
- Singarimbun, Masri 2004, *Metode Penelitian Surpey*, Penerbit LP3ES ; Jakarta
- Umar, Husein,2004, *metode riset ilmu administrasi*, PT gramedia pustaka utama ; Jakarta
- Siagian, S.p, 2005, *kepemimpinan dan prilaku*, Penerbit PT Agung ; Jakarta
- Sugiono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta ; Bandung
- kencana syafi'i, INu, 2003, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*, CV. Mandar Maju ; Bandung
- Erma, Suradinata, 2006, *Otonomi Daerah dan Paradigma baru Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Politik dan Bisnis*, CV. Suara Bebas ; Jakarta
- Maryoto, Susilo, 1997 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit BPFE ; Yogyakarta
- Rivai ,Viethzal, 2004, *kepemimpinan*, Penerbit PT Raja Grafindo ; Jakarta
- Gerugun U Effendi, Wa, 1995, *System Informasi Dan Manajemen*, penerbit CV Mandar Maju, Bandung.

Yualiti, 2003, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, Penerbit LP3ES ; Jakarta.

Sumber Lainnya :

1. Peraturan daerah Kuantan Singingi tahun 2009 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah